

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan perluasan pelayanan menjadi 100%, kebutuhan biaya operasional pengelolaan sampah adalah:
 - Skenario pengelolaan sampah secara konvensional adalah sebesar Rp. 8.492.964.500 per tahun atau Rp.100.593 per m³, jika 100% timbulan sampah masuk ke TPA.
 - Skenario pengelolaan sampah pola pengumpulan individual tidak langsung sebesar Rp.9.888.036.750 per tahun atau Rp.117.117 per m³, jika 100% timbulan sampah masuk ke TPA.
 - Skenario pengelolaan sampah pola pengumpulan komunal langsung sebesar Rp.5.426.858.250 per tahun atau Rp.64.277 per m³, jika 100% timbulan sampah masuk ke TPA.
 - Skenario pengelolaan sampah di bank sampah sebesar Rp.7.149.721.750 per tahun atau Rp.84.683 per m³ jika 90% timbulan sampah masuk ke TPA, dan sebesar Rp.2.209.170.000 per tahun atau Rp.26.166 per m³ jika sampah yang masuk ke TPA hanya 20%.
 - Skenario pengelolaan sampah di TPST sebesar Rp.8.362.621.000 per tahun atau Rp.99.049 per m³ jika 90% timbulan sampah masuk ke TPA, dan sebesar Rp. 7.498.052.250 per tahun atau Rp.88.809 per m³ jika sampah yang masuk ke TPA hanya 20%.
2. Sumber pembiayaan pengelolaan sampah yang berasal dari masyarakat dihitung dari potensi retribusi berdasarkan WTP dan WTA masyarakat. Adapun potensi retribusi untuk masing-masing skenario pengelolaan adalah sebesar Rp. Rp1.968.988.258 untuk pengelolaan sampah secara konvensional, Rp1.883.047.500 untuk pengelolaan dengan pola pengumpulan individual tidak langsung, Rp1.450.644.000 untuk pengelolaan dengan pola pengumpulan komunal langsung, Rp2.196.922.771 untuk skenario pengelolaan di bank sampah, dan Rp1.636.624.000 untuk skenario pengelolaan di TPST. Pembiayaan pengelolaan sampah yang bersumber dari pemerintah dilihat dari kemampuan keuangan daerah,

indikatornya yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Dari hasil perhitungan, rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pariaman termasuk kategori sangat rendah, sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah termasuk sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sangat rendah, sedangkan bantuan keuangan berupa dana perimbangan sangat dominan dalam pendapatan daerah Kota Pariaman.

3. Strategi pembiayaan pengelolaan sampah yang paling efektif dan efisien adalah pengelolaan sampah di bank sampah pada masing-masing desa di Kota Pariaman. Pemilihan skenario ini disebabkan karena merupakan skenario yang memenuhi seluruh tujuan pengelolaan sampah itu sendiri, paling banyak dipilih oleh masyarakat, nilai potensi retribusi paling tinggi dibanding skenario lainnya, adanya dukungan dari kepala desa dan bank sampah merupakan alternatif pengelolaan sampah yang saat ini sedang fokus dikembangkan pemerintah dalam program KoTaKu (Kota Tanpa Kumuh).

B. Saran

Untuk perbaikan pengelolaan persampahan Kota Pariaman, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pariaman hendaknya menyusun rencana jangka panjang pengelolaan sampah, agar terpetakan kebutuhan pembiayaan prioritas tahunan demi tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan berkelanjutan melalui penggunaan pendekatan teknologi terkini.
2. Pemerintah Kota Pariaman hendaknya meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pentingnya pengelolaan sampah, karena peran masyarakat yang sangat besar dalam meminimalisir sampah. Selain itu Pemerintah Kota Pariaman hendaknya mampu melakukan optimalisasi penerimaan retribusi sampah, dengan cara memperluas cakupan pelayanan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan dan melakukan perencanaan pengelolaan kebersihan yang lebih terarah.
3. Pemko Pariaman diharapkan menerapkan pengelolaan sampah dengan skenario pengurangan sampah di bank sampah pada masing-masing desa. Agar strategi

pembiayaan pengelolaan sampah melalui pengelolaan sampah di bank sampah pada masing-masing desa di Kota Pariaman, dapat berjalan efektif dan efisien, perlu diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai mekanisme kerja dan proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem informasi, supaya bisnis bank sampah memiliki keberlanjutan usahanya dan memiliki nilai ekonomis yang lebih baik.

4. Perlu penelitian lanjutan mengenai sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Pariaman. Tidak hanya yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah, namun juga kemungkinan pembiayaan dari swasta atau kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga.

